

UAS TAKEHOME EPHK

NAMA : NURUL SABILLAH

NIM : 2110101124

PRODI : S1 KEBIDANAN

KELAS/SEMESTER : B/2

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/PO/AO datang ke PMB dengan keluhan Mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien Bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat Mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak Kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui Pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini Dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan Menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, Warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit Terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan Pendapat Saudara!

Jawaban:

Kasus yang disajikan termasuk dalam kasus hukum dan ada juga kaitannya dengan masalah etik. Karena dalam kasus tersebut hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak merupakan hak dasar sebagaimana yang Yang telah tertera dalam UUD 1945 pasal 28 H "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dibalik itu juga, ini mencakup masalah etik dalam pelayanan praktik bidan dimana Bidan tidak bisa memenuhi atau menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya dengan beralasan sakit sehingga terpaksa pasien melahirkan didepan rumah bidan , dan bidan keluar dari rumahnya setelah 1 jam selsai melahirkan dimana kondisi bayi pada saat lahir tidak langsung menangis, warna kulit kebiruan, sulit bernafas sehingga bayi tidak dapat diselamatkan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab: Pertanggung jawaban bidan dalam kasus tersebut adalah:

1. Menolong ibu nya agar mendapatkan perawatan selayaknya ibu setelah Melahirkan di klinik bidan tersebut.

Jawaban:

Kasus yang disajikan termasuk dalam kasus hukum dan ada juga kaitannya dengan masalah etik. Karena dalam kasus tersebut hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu Dan anak merupakan hak dasar sebagaimana yang Yang telah tertera dalam UUD 1945 pasal 28 H “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, Bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dibalik itu juga, ini mencakup masalah etik dalam pelayanan praktik bidan dimana Bidan tidak bisa memenuhi atau menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya dengan Beralasan sakit sehingga terpaksa pasien melahirkan didepan rumah bidan , dan bidan Keluar dari rumahnya setelah 1 jam selsai melahirkan dimana kondisi bayi pada saat Lahir tidak langsung menangis,warna kulit kebiruan,sulit bernafas sehingga bayi tidak Dapat diselamatkan.

2. meminta maaf kepada Keluarga atas keterlambatannya menangani ibu dan bayi, karena tidak melaksanakan profesinya berdasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat (1) Dan (2) UU Kesehatan). Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan Tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan. Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan, bidan harus mengikuti standar Profesi Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia Dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat Mengajukan pertanggungjawab an bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau Perbuatan melawan hukum.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawaban:

Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh Perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar Prosedur operasional. Akan tetapi didalam kasus tersebut bidan melakukan kesalahan yang melanggar kode Etik. Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam Kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Akibat dari Kesalahan bidan tersebut bisa dilakukan pencabutan izin praktik sementara, IBI juga Akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang Sakit ?

Jawaban:

Memberikan informasi yang lengkap pada pasien dan keluarga pasien Dan bersikap jujur, dapat dipahami oleh klien, menggunakan alternative media Dan paling baik dilakukan dengan tatap muka. Dimana juga bidan harus Pengambilan keputusan jika benar bidan dalam keadaan kurang sehat adalah Berdasarkan UU , Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau Standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kepmenkes RI No.369/Menkes/SK/III/2007. Hubungan perikatan antara bidan dengan pasien Termasuk dalam kategori perikatan ikhtiar. Bidan berupaya semaksimal mungkin, Sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat Praktik bidan untuk mendapatkan pelayanan kebidanan, maka perikatan yang terjadi Atas dasar perjanjian. Peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang terkait Dengan praktik bidan diantaranya Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kepmenkes RI No.1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan praktik bidan, undang-undang tentang aborsi, undang-undang tentang Adopsi.

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka Penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan Pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam Organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek Yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Maka IBI 49 melalui MPA dan MPEB Wajib melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan Kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian Tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah Melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib Memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut dalam menghadapi tuntutan atau Gugatan di pengadilan.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat Praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi Dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?

Jawaban:

Langkah pertama untuk menyelesaikan dugaan malpraktik kebidanan yaitu Dengan cara melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian serta menanyakan Kepada bidan terkait hal yang terjadi. Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan Bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan Profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya Kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas, dan juga perubahan Hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek Yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan Tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan Tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, Dan lain-lain. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode Etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku Didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan Malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu juga Pertanggung jawaban pidana malpraktik yang dilakukan oleh bidan Dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, Karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktik.

REFERENSI:

Rida Kurniawan. 2018. Jurnal perbuatan melawan hukum terhadap wewenang Pelayanan bidan praktik mandiri berdasarkan peraturan perundangan Undangan di Indonesia. Vol 7

Mujiwati(2020).Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan.Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 Hal. 705-717

K.H. Endah Widhi Astuti(2016).Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan.Cetakan Pertama, Desember.Jumlah Halaman:15

Isnanto Bidja(2021).Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien.Jurnal Media Hukum, Volume 9, Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk.